



**BALAI LITBANG AGAMA
MAKASSAR**

POLICY BRIEF

**SARASEHAN
MODERASI BERAGAMA
DAN PEMBAHASAN
POLICY BRIEF
KEBIJAKAN
KEAGAMAAN**



SARASEHAN MODERASI BERAGAMA DAN PEMBAHASAN POLICY BRIEF KEBIJAKAN KEAGAMAAN

Nurhidayah Putri Wijayanti Yusuf, S.Sos
Analisis Kebijakan Ahli Pertama
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Kementerian Agama
Email: blamputri@gmail.com

Executive Summary

Kegiatan Sarasehan moderasi beragama dan pembahasan policy brief kebijakan keagamaan merupakan langkah strategis dalam memperkuat moderasi beragama melalui kebijakan yang efektif, inklusif dan berbasis data. Melalui kolaborasi antar lembaga maka diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih baik.

Adapun beberapa permasalahan yang perlu diatasi antara lain: 1. Kurangnya keterampilan dalam penyusunan policy brief, 2. Penyanyian data yang tidak menarik, 3. Kurangnya ruang dialog. Maka dari itu diperlukan alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1. Mendorong pemerintah untuk menyediakan platform atau ruang dialog antar analis kebijakan di tingkat nasional maupun daerah, 2. Membuat website informatif dan interaktif yang memungkinkan semua analis kebijakan di kementerian agama dapat mengakses, memahami, dan memberikan masukan terhadap policy brief yang telah disusun, 3. Kementerian Agama dapat berkolaborasi dengan Lembaga administrasi Negara dalam menyelenggarakan pelatihan atau workshop bagi para analis kebijakan

Kegiatan sarasehan moderasi beragama dan pembahasan policy brief kebijakan Keagamaan telah berhasil membuka ruang diskusi yang penting mengenai tata cara penyusunan policy brief yang menarik dan bagaimana kebijakan keagamaan dapat mendukung moderasi beragama di Indonesia. Ke depan, kolaborasi antara lembaga-lembaga terkait dan penyusunan kebijakan berbasis data yang relevan akan menjadi kunci dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia.

Kata Kunci : Sarasehan Moderasi Beragama, Policy Brief

PENDAHULUAN

Pembahasan *policy brief* Kebijakan keagamaan menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memastikan kehidupan beragama di Indonesia berjalan dalam harmoni, menghormati keberagaman dan mendukung pembangunan nasional. Salah satu pendekatan strategis yang relevan dalam konteks ini adalah moderasi beragama, yang menekankan keseimbangan antara pengamalan nilai-nilai agama dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, serta penghindaran terhadap ekstremisme dalam bentuk apa pun sesuai yang diatur dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan

Moderasi Beragama, yang menjadi landasan penting untuk mengimplementasikan kegiatan moderasi beragama di berbagai sektor kehidupan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan yang berlandaskan moderasi beragama, diperlukan sebuah dokumen kebijakan yang komprehensif dan berbasis data, seperti *policy brief*. Pembahasan *policy brief* kebijakan keagamaan bertujuan untuk menyediakan panduan strategis dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dasar rujukan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analis kebijakan.

Dalam praktiknya, pembahasan *policy brief* ini menjadi alat bagi seorang analis kebijakan dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang baik dan tentunya dapat menyajikan basis bukti secara menarik, menggunakan desain yang kreatif dan inovatif serta menggunakan bahasa yang padat dan jelas termaksud memberikan karakteristik dan tujuan yang jelas. Selain itu, juga diperlukan latihan kepada peserta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Oleh karena itu, kegiatan pembahasan *policy brief* ini tidak hanya memberikan pembahasan teoritis tetapi membekali peserta dengan keterampilan yang kreatif.

DESKRIPSI MASALAH

Penyusunan *policy brief* adalah proses yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang akan diangkat, serta kemampuan untuk menyusun analisis dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan strategis. Namun, proses ini sering menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kualitas dan efektivitas dokumen yang dihasilkan. Berikut adalah deskripsi masalah utamanya:

1. Kurangnya Keterampilan dalam Penyusunan *Policy Brief*.

Tidak semua peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menyusun *policy brief* dan Struktur dokumen yang dihasilkan sering kali tidak memenuhi standar, seperti kurangnya analisis mendalam atau rekomendasi yang spesifik

2. Penyajian data yang tidak menarik

Penyajian data dalam *policy brief* sering kali berupa teks panjang atau tabel yang sulit dipahami dan kurang menggugah perhatian serta menggunakan visualisasi yang tidak

menarik yang mengakibatkan pembaca cepat merasa jenuh dan kehilangan minat untuk membaca.

3. Kurangnya ruang dialog antar analis kebijakan

Kurangnya ruang dialog di antara para analis kebijakan, hal ini menghambat terjadinya kolaborasi yang maksimal dalam penyusunan *policy brief* khususnya terkait isu-isu moderasi beragama.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Mendorong pemerintah untuk menyediakan platform atau ruang dialog bagi analis kebijakan di tingkat nasional maupun daerah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
2. Membuat website informatif dan interaktif yang memungkinkan semua analis kebijakan di Kementerian Agama dapat mengakses, memahami dan memberikan masukan terhadap *policy brief* yang telah disusun seperti membuat katalog *policy brief* yang ada dalam kategori-kategori tertentu (misalnya berdasarkan tema, tahun, atau topik) sehingga memberikan ruang bagi seorang analis kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi ide dan memberikan masukan terkait kebijakan tersebut.
3. Kementerian Agama dapat berkolaborasi dengan Lembaga administrasi Negara dalam menyelenggarakan pelatihan atau workshop bagi para analis kebijakan tentang cara menyusun kebijakan publik yang lebih efektif dan menarik serta teknik komunikasi yang baik.

KESIMPULAN

Kebijakan keagamaan yang baik harus mendukung nilai-nilai moderasi beragama dan mengakomodasi keberagaman yang ada dalam masyarakat. Pembahasan *policy brief* menunjukkan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis data dan riset yang melibatkan berbagai stakeholder agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dengan baik dan memiliki dampak yang positif. Kegiatan ini pula memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan masyarakat dalam menyusun dan menerapkan kebijakan keagamaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan

yang berorientasi pada keadilan sosial dan kerukunan antar umat beragama. Para peserta sarasehan menyepakati perlunya adanya dialog berkelanjutan dan pendekatan yang lebih inklusif dalam merancang kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan bisa diterima oleh seluruh elemen masyarakat dan juga untuk meningkatkan kapasitas para analis kebijakan dalam memahami prinsip moderasi beragama, serta bagaimana kebijakan keagamaan dapat disusun agar efektif dan berkelanjutan. Melalui diskusi dan pembahasan *policy brief*, diharapkan para analis kebijakan dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika sosial dan agama yang ada, serta mampu menghasilkan kebijakan yang lebih terukur dan aplikatif.